

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia. Merujuk pada data Kementerian Keuangan, tidak kurang dari 80 persen postur pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari sektor pajak (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun, Rp 1.618,1 triliun berasal dari penerimaan pajak dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (balipost.com). Besarnya porsi penerimaan pajak menandakan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah selayaknya setiap warga negara mengetahui dengan baik setiap aspek perpajakan serta didukung dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (pajak.go.id).

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Andaikan penerimaan pajak kurang maksimal, maka dampaknya akan membebani APBN. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang sangat mendominasi dalam penerimaan negara, yaitu sekitar 80 persen penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dapat kita bayangkan apabila penerimaan pajak tidak maksimal, hal ini akan mengganggu pos pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah. Pos tersebut

digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, subsidi ke masyarakat, maupun beberapa pengeluaran lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dan hal tersebut berkemungkinan akan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang akan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat menurun, daya saing bangsa juga akan menurun. Karena itulah mulai sekarang, perlu adanya pendekatan secara komprehensif dan bersifat menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran pajak, khususnya menanamkan kesadaran pajak pada usia dini, usia yang masih bisa secara maksimal ditanamkan nilai-nilai kesadaran pajak. Ketika penerimaan pajak secara berkesinambungan selalu terjaga dan bahkan dapat meningkat secara signifikan, hal ini membuat pembangunan menjadi berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.

Melihat kondisi kesadaran pajak masyarakat Indonesia saat ini, bisa dikatakan bahwa kondisi kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Pada tahun 2017, rasio pajak atau *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,8 persen (berdasarkan data hasil audit BPK tahun 2017). Di wilayah Asia Tenggara, rasio perpajakan Indonesia masih di bawah negara Kamboja, Singapura, Malaysia dan Filipina. Sedangkan di kancan dunia, rasio pajak Indonesia sebesar 10,8 persen ini masih jauh di bawah standar rasio pajak ideal menurut Bank Dunia (*World Bank*) yaitu sekitar 15 persen (pajak.go.id).

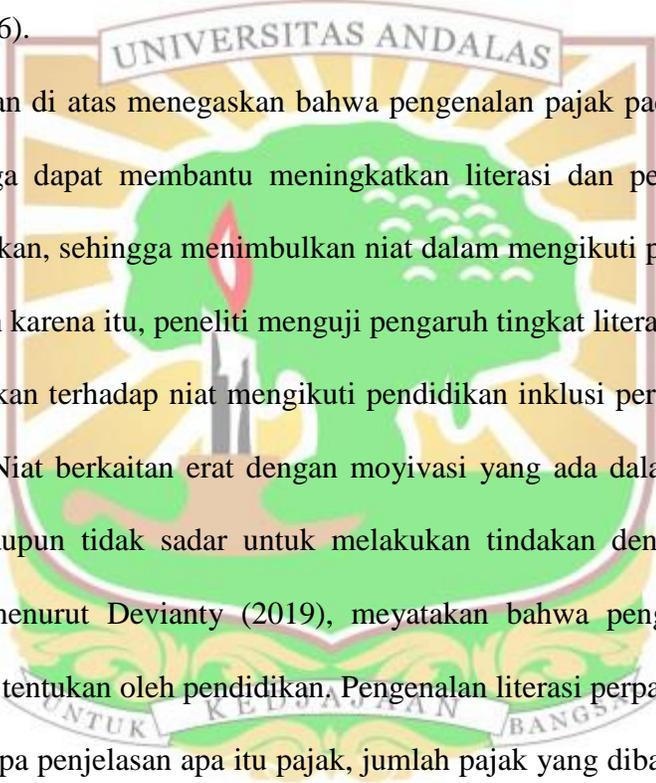
Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini adalah masih rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baru 5% masyarakat Indonesia

yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta baru 0,1% masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak. Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan. Kesadaran perpajakan perlu ditanamkan dalam pendidikan melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan mahasiswa

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program inklusi kesadaran pajak pada pendidikan nasional. Dimana program tersebut bertujuan untuk mengedukasi generasi penerus bangsa mengenai nilai-nilai kesadaran pajak dan mewujudkan generasi sadar pajak. Program inklusi kesadaran pajak ini diisi dengan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi kesadaran pajak pada pendidikan dasar. Apabila penanaman nilai kesadaran pajak berhasil pada usia dini, diharapkan para remaja pada saat dewasa misalkan saat bekerja maupun mempunyai usaha, mereka sudah memiliki kesadaran akan kewajiban pajak dan mengerti pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan negara. Karena masih rendahnya tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pajak ini, maka akan berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pajak, kecuali pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor yang memang diwajibkan dan diketahui secara meluas di masyarakat.

Memperkenalkan pajak pada generasi muda sejak dini penting. Hal ini dikarenakan pada usia dini, seorang siswa masih relatif mudah ditanamkan berbagai karakter dan penanaman sikap dasar. Menurut Mansur (2005:88) anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang

khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa emas atau *golden age*, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Menurut berbagai penelitian di bidang neurologi terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100% (Suyanto, 2005: 6).



Pernyataan di atas menegaskan bahwa pengenalan pajak pada generasi muda sejak dini diduga dapat membantu meningkatkan literasi dan persepsi yang baik terhadap perpajakan, sehingga menimbulkan niat dalam mengikuti pendidikan inklusi perpajakan. Oleh karena itu, peneliti menguji pengaruh tingkat literasi perpajakan dan persepsi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan. Menurut Novita (2010), Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu. Lalu menurut Devianty (2019), menyatakan bahwa penguasaan terhadap literasi sangat di tentukan oleh pendidikan. Pengenalan literasi perpajakan ke generasi muda dapat berupa penjelasan apa itu pajak, jumlah pajak yang dibayar, pemanfaatan pajak, penyampaian SPT melalui *drop box*, peraturan perpajakan yang *up to date*, dan fasilitas perpajakan yang modern. Barang publik, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan didanai oleh pajak serta merupakan elemen-elemen yang paling akrab ditemui di kehidupan sehari-hari generasi muda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguatan pemahaman pada sektor-sektor ini berpeluang besar dalam menanamkan moral dan etika pajak serta minat dalam belajar pajak.

Pajak sebagai segmen fundamental penyumbang pendapatan terbesar negara harus diimbangi dengan upaya-upaya mendasar dan konstruktif oleh pemerintah untuk menyokong pertumbuhan pajak dan pencapaiannya. Generasi post-millennial adalah prospek jangka panjang negara dan sudah semestinya mereka didukung dengan ruang dan kesempatan literasi. Literasi amat penting dalam suatu negara sebab literasi selain sebagai salah satu media edukasi, juga sebagai alat untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan dan kemampuan literasi adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Orang berpendidikan diharapkan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa.

1.2. Rumusan Masalah

Pentingnya pengetahuan pajak sejak dini ini sangat diperlukan karena pada usia dini, seorang siswa masih relatif mudah ditanamkan berbagai karakter dan penanaman sikap dasar. Pendidikan dan kemampuan literasi adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Orang berpendidikan diharapkan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa.

Dengan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat literasi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan?
2. Bagaimana pengaruh persepsi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan?
3. Apakah ada perbedaan niat dalam mengikuti pendidikan inklusi perpajakan antara sekolah bisnis dan nonbisnis?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pendidikan literasi perpajakan sejak dini agar setelah mereka dewasa nanti, misalkan saat bekerja maupun mempunyai usaha, mereka sudah memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan yang cukup akan kewajiban pajak dan mengerti pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan
3. Untuk mengidentifikasi perbedaan niat dalam mengikuti pendidikan inklusi perpajakan antara sekolah bisnis dan nonbisnis

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait adanya pengaruh tingkat literasi perpajakan dan persepsi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan mahasiswa tahun satu.

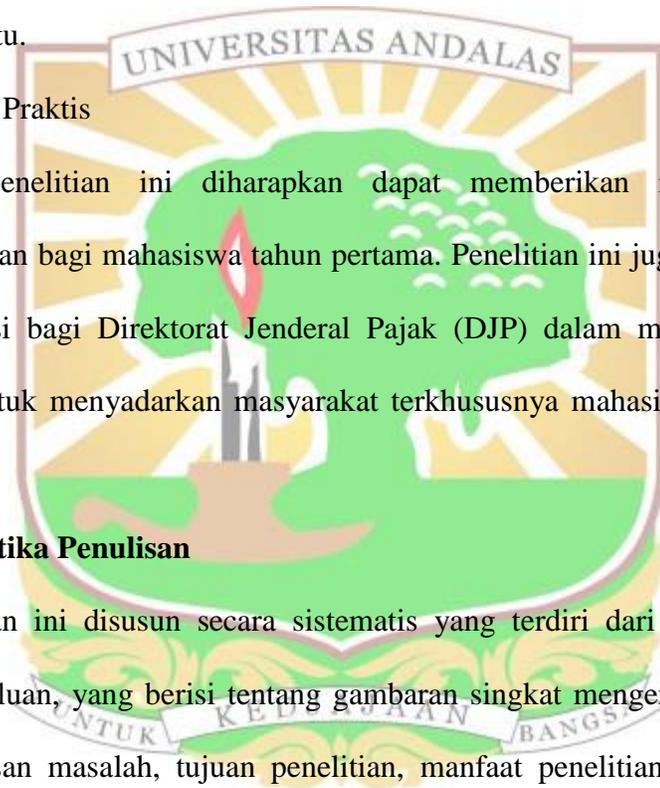
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang perpajakan bagi mahasiswa tahun pertama. Penelitian ini juga dapat dijadikan informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyusun program kerja untuk menyadarkan masyarakat terkhususnya mahasiswa di Perguruan Tinggi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang gambaran singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah telaah literatur, yang berisi tentang landasan teori dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III adalah metodologi penelitian, dimana menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode



analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan pokok dari penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data, serta pembahasan mengenai pengaruh kualitas aparat pajak dan dukungan organisasi persepsian terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Bab V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan penelitian mendatang.

